

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2016**



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA, MARET 2017**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2016 ini dapat selesai pada waktunya.

Laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka memberikan gambaran keterbukaan informasi tentang kegiatan teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Akhir kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana dalam laporan ini terdapat kekurangan serta kesalahan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Samarinda, Maret 2017
Sekretaris Dinas Kehutanan
selaku
Koordinator PPID Dinas Kehutanan

Ir. H. Wahyudi, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19610212 199303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Gambaran Umum	1
I Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
B. Sumber Daya Manusia	5
C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	5
III Rincian Pelayanan Informasi Publik	6
IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	12
V Kendala Eksternal dan Internal	12
VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	12
VII Penutup	13

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	14
Aplikasi Sistem Informasi	15
Lampiran 2	18

GAMBARAN UMUM DINAS KEHUTANAN

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hutan.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Peredaran dan industri hasil hutan.
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan.
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan, Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Kepala Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan dan Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan serta Kepala UPTD Dinas Kehutanan.

Setiap satuan kerja perangkat dinas (SKPD) memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang fungsinya mengelola data dan informasi mengenai masing-masing SKPD.

Sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, PPID mempunyai peran yang sangat strategis dalam konteks penyediaan data dan informasi kehutanan, database Kehutanan, media informasi (Website), Sinkronisasi data dan peta serta sistem aksesibilitas terhadap data dan informasi. Amanah dan peran strategis PPID tersebut telah menjadikan salah satu prioritas pengembangan data dan informasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas tersebut telah diterjemahkan dalam program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan dengan kegiatan pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada pasal 4 dan Bab VII pasal 36. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, meliputi data informasi kehutanan di Kalimantan Timur, kegiatan dan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maka perlu disusun laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap ada permohonan data dan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim akan dilayani dengan baik. Permohonan data dan informasi yang ditujukan kepada setiap bidang Dinas Kehutanan akan diteruskan kepada PPID. Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan data dan informasinya dapat mendatangi ruang PPID Dinas Kehutanan dengan syarat membawa surat permohonan data dan informasi.

Selain memberikan layanan data dan informasi atas dasar permintaan, Dinas Kehutanan juga secara aktif memberikan layanan data dan informasi mengupload data dan informasi secara berkala. Situs resmi Dinas Kehutanan Prov. Kaltim (<http://www.dishut.kaltimprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik yang wajib disediakan dan diupload di situs website secara berkala. Operasional layanan informasi publik yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 08.00 WITA s.d 16.00 WITA. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan permintaan data dan informasi dengan berbagai sarana komunikasi diantaranya menggunakan email (dishut.ppid@gmail.com) tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kehutanan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik PPID Dinas Kehutanan Prov. Kaltim menyediakan ruangan yang berisi 4 meja, 6 kursi, 1 PC Desktop dan 2 Laptop serta 4 kursi sofa 1 meja kecil untuk tamu. Ruangan ini dilengkapi 1 AC, akses internet dan 2 rak lemari besar untuk menyimpan buku-buku tentang kehutanan.



Foto Ruang Layanan Informasi Publik

Data-data yang terkumpul juga dapat di akses melalui website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu <http://dishut.kaltimprov.go.id> pada bagian menu **Download Data Kehutanan** seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Laman web resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

B. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID di Dinas Kehutanan Prov. Kaltim melibatkan sumber daya manusia sebanyak 3 orang yang bertugas melayani permintaan data dan informasi dengan kualifikasi yang membidangi komunikasi, kehumasan, layanan data dan informasi.

Guna menjaga data tetap update secara rutin staf PPID meminta data setiap bidang-bidang di Dinas Kehutanan Prov. Kaltim agar saling koordinasi data yang telah di perbaharui.

C. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan informasi publik di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di bebaskan dalam Rencana Kerja Anggaran DIPA Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2016.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2016 PPID Dinas Kehutanan menerima 22 (dua puluh dua) permohonan data dan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan instansi antara lain dari mahasiswa , akademisi, LSM dan Instansi Pemerintah.

Permohonan data dan informasi waktu yang diperlukan atau dikabulkan sekitar 3 hari sampai 5 hari. Permohonan data dan informasi dikabulkan sepenuhnya, tidak ada yang ditolak.

Tabel Rincian Pelayanan Informasi Publik

No	Siapa yang meminta	Data apa yang diminta	Data apa yang diberikan	Permintaan data yang ditolak
1.	BPS (Badan Pusat Statistik) Prov. Kaltim	Produksi Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu. Target HTI, IPK dan RKT. Lahan Kritis	Produksi Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu. Target HTI, IPK dan RKT. Lahan Kritis	Tidak ada
2.	Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Prov. Kaltim	Jumlah Ijin Usaha Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HA dan HT), Hasil Hutan Kayu (Kayu Bulat dan Kayu Olahan), Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan), Produksi Kayu Hutan Rakyat, Industri Primer Hasil Hutan, Luas Kawasan Hutan, Luas Areal Hutan yang terbakar, Jumlah Korban Jiwa, Jumlah titik hotspot, Luas Inventarisasi Kawasan, Luas Penanaman Mangrove, Jumlah HCV di kawasan hutan,	Jumlah Ijin Usaha Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HA dan HT), Hasil Hutan Kayu (Kayu Bulat dan Kayu Olahan), Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan), Produksi Kayu Hutan Rakyat, Industri Primer Hasil Hutan, Luas Kawasan Hutan, Luas Areal Hutan yang terbakar, Jumlah Korban Jiwa, Jumlah titik hotspot, Luas Inventarisasi Kawasan, Luas Penanaman Mangrove, Jumlah HCV di kawasan hutan, Jumlah desa miskin	Tidak ada

		Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu, Jumlah Polisi Hutan, Jumlah KPH, Volume Kayu yang dicuri, Jumlah Kasus, Jumlah Lokasi Pencurian dan Penyelundup, Luas Lahan Hutan, Luas Rehabilitasi Hutan dan lahan, Luas Lahan Kritis, Jumlah Pembinaan dan Perlindungan Hutan	sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu, Jumlah Polisi Hutan, Jumlah KPH, Volume Kayu yang dicuri, Jumlah Kasus, Jumlah Lokasi Pencurian dan Penyelundup, Luas Lahan Hutan, Luas Rehabilitasi Hutan dan lahan, Luas Lahan Kritis, Jumlah Pembinaan dan Perlindungan Hutan	
3.	Bioma	Produksi Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu. Target HTI, IPK dan RKT. Lahan Kritis	Produksi Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu. Target HTI, IPK dan RKT. Lahan Kritis	Tidak ada
4.	Fakultas Kehutanan Univ. Mulawarman	IUIPHHK, IUPHHK HA, HTI, IPK, Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan.	IUIPHHK, IUPHHK HA, HTI, IPK, Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan.	Tidak ada
5.	UNDP (United Nations Development Programme)	1. Persentase luas kawasan hutan yang telah ditetapkan dibandingkan dengan luas kawasan hutan secara nasional, provinsi dan kabupaten. 2. Rasio pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat dan korporasi dalam priode	1. Persentase luas kawasan hutan yang telah ditetapkan dibandingkan dengan luas kawasan hutan secara nasional, provinsi dan kabupaten. 2. Rasio pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat dan korporasi dalam priode 2012-2014 secara	Tidak ada

		2012-2014 secara nasional. 3. Persentase KPH yang terbentuk kelembagaannya dan yang telah beroperasi sesuai tahapannya secara nasional. Rasio jagawana/polisi hutan/ penjaga hutan dengan kawasan hutan secara nasional.	nasional. 3. Persentase KPH yang terbentuk kelembagaannya dan yang telah beroperasi sesuai tahapannya secara nasional. Rasio jagawana/polisi hutan/ penjaga hutan dengan kawasan hutan secara nasional.	
6.	BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Prov. Kaltim	Data Lahan Kritis	Data Lahan Kritis	Tidak ada
7.	IIT	Indikator Kinerja Pembangunan, Realisasi Anggaran Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, Strategi dan rencana aksi provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ Kaltim.	Indikator Kinerja Pembangunan, Realisasi Anggaran Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, Strategi dan rencana aksi provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ Kaltim.	Tidak ada
8.	Dwi Nur Laila (Peneliti)	Lahan Kritis, Luas Kawasan Hutan, Luas Kebakaran Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Lahan Kritis, Luas Kawasan Hutan, Luas Kebakaran Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Tidak ada
9.	BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Prov. Kaltim	Komoditi Unggulan Sektor Kehutanan	Komoditi Unggulan Sektor Kehutanan	Tidak ada
10.	BPPMD (Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah) Prov. Kaltim	Luas Kawasan Hutan, IUPHHK HA dan HTI, Kayu Olahan, Hasil Hutan Bukan Kayu,	Luas Kawasan Hutan, IUPHHK HA dan HTI, Kayu Olahan, Hasil Hutan Bukan Kayu, Kayu	Tidak ada

		Kayu Bulat	Bulat	
11.	Menteri Perhubungan RI	Jenis komoditas kehutanan yang diperoleh/dikirim dari luar wilayah untuk digunakan/dikonsumsi di wilayah Kalimantan Timur, Data sebaran kawasan hutan, IUPHHK HA, 1. APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) 2. ISWA (International Solid Waste Association) 3. APKINDO (Asosiasi Panel Kayu Indonesia) 4. ASMINDO (Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia)	Jenis komoditas kehutanan yang diperoleh/dikirim dari luar wilayah untuk digunakan/dikonsumsi di wilayah Kalimantan Timur, Data sebaran kawasan hutan, IUPHHK HA, 1. APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) 2. ISWA (International Solid Waste Association) 3. APKINDO (Asosiasi Panel Kayu Indonesia) 4. ASMINDO (Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia)	Tidak ada
12.	Kantor Dirjen Pajak Kaltim dan Kaltara	1. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKT UPHHK-HA) 2. Rekapitulasi data dan Sebaran Peta Ijin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH); 3. Laporan Hasil Penebangan dan/atau Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) 4. Rekapitulasi data dan Sebaran Peta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);	1. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKT UPHHK-HA) 2. Rekapitulasi data dan Sebaran Peta Ijin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH); 3. Laporan Hasil Penebangan dan/atau Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) 4. Rekapitulasi data dan Sebaran Peta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);	Tidak ada

		5. Harga patokan kayu untuk Perhitungan PSDH.	5. Harga patokan kayu untuk Perhitungan PSDH.	
13.	Participatory Governance Assessment Democratic Governance & Poverty Reduction Unit	Validasi Data Indeks Tata Kelola Hutan (PGA)	Validasi Data Indeks Tata Kelola Hutan (PGA)	Tidak ada
14.	Kementerian Kehutanan Dirjen. Otonomi Daerah RI	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Administrasi, Jumlah APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Luas Kawasan Hutan, Lahan Kritis, KPH, Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, Taman Hutan Raya (TAHURA)	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Administrasi, Jumlah APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Luas Kawasan Hutan, Lahan Kritis, KPH, Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, Taman Hutan Raya (TAHURA)	Tidak ada
15.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Kaltim	Rekapitulasi Jumlah Tenaga Teknis Kehutanan pada IUPPHK HA di Wil. Kaltim	Rekapitulasi Jumlah Tenaga Teknis Kehutanan pada IUPPHK HA di Wil. Kaltim	Tidak ada
16.	Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kaltim	IUPPHK HA dan HTI	IUPPHK HA dan HTI	Tidak ada
17.	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Perkembangan Luas dan Produk Hasil Hutan Kayu	Perkembangan Luas dan Produk Hasil Hutan Kayu	Tidak ada
18.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Kawasan konservasi, produksi hasil hutan, lahan kritis, Daerah Aliran Sungai, peraturan perundang-	Kawasan konservasi, produksi hasil hutan, lahan kritis, Daerah Aliran Sungai, peraturan perundang-undangan	Tidak ada

		undangan daerah terkait sumber daya hutan, data sungai di prov. Kaltim	daerah terkait sumber daya hutan, data sungai di prov. Kaltim	
19.	Sekretaris Daerah Prov. Kaltim	Luas Kawasan Hutan dan Lahan Kritis	Luas Kawasan Hutan dan Lahan Kritis	Tidak ada
20.	The Nature Conservancy	Rencana dan Realisasi Tebangan RKT	Rencana dan Realisasi Tebangan RKT	Tidak ada
21.	Wihelwina Annisa Putri (Mahasiswi ITK)	Luas lahan deforestasi hutan dan lahan kritis	Luas lahan deforestasi hutan dan lahan kritis	Tidak ada
22.	Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu	Daftar IUPHHK HA dan HTI, Daftar IPK, Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan, Daftar Nama-nama Sawmill Masyarakat terdaftar	Daftar IUPHHK HA dan HTI, Daftar IPK, Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan, Daftar Nama-nama Sawmill Masyarakat terdaftar	Tidak ada

Keterangan :

HA	Hutan Alam
HTI	Hutan Tanam Industri
RKT	Rencana Kerja Tahunan
HCV	High Conservation Value
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
IUPHHK	Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
IUIPHHK	Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
IPK	Ijin Pemanfaatan Kayu

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2016 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak ada menerima keberatan dan gugatan tentang permintaan data dan informasi.

V. Kendala Eksternal dan Internal

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Kehutanan Prov. Kaltim sebagai berikut :

- A. Pengelolaan data masih sebagian manual di setiap bidang-bidang unit kerja.
- B. Pengelolaan data masih sebagian belum terupdate secara berkala.
- C. Dalam memenuhi permohonan informasi diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja yang terkait permohonan informasi tersebut. Sehingga pelaksana PPID, harus aktif untuk mendapatkan jawaban terhadap permohonan informasi.
- D. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan unit kerja masih kurang.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- A. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit-unit teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
- B. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
- C. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis website.
- D. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan meningkatkan jejaring layanan informasi di lingkungan PPID Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.

VII. Penutup

Laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan mengakomodir amanah tentang keterbukaan informasi. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang terbaru, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh data dan informasi tentang kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN 1
APLIKASI SISTEM INFORMASI
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

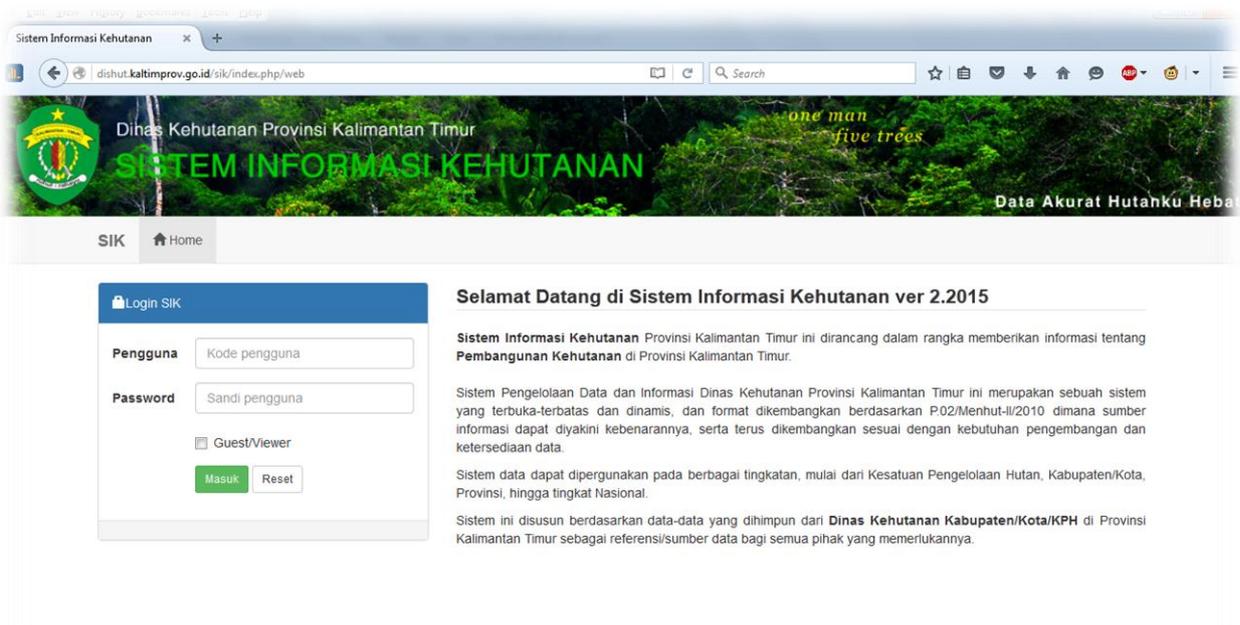
Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



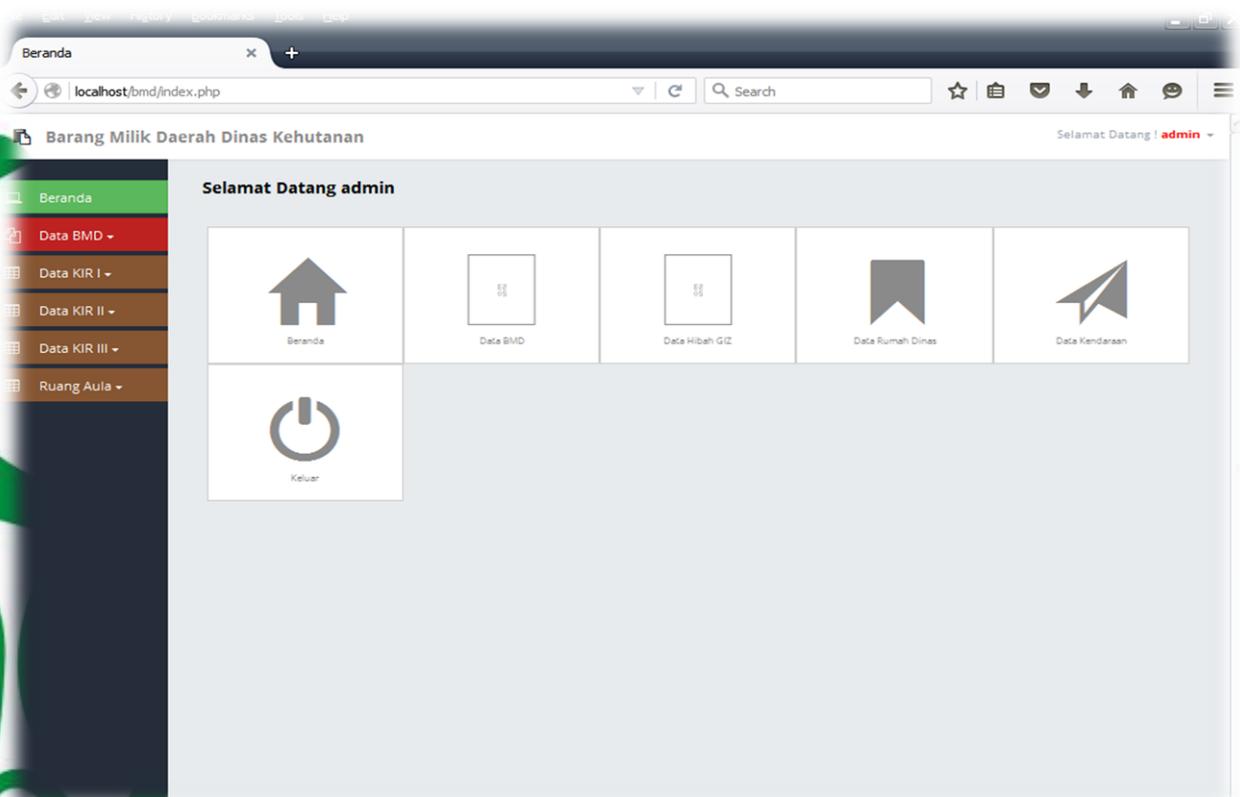
Sistem Informasi Agenda Surat Masuk dan Keluar berbasis website di ruangan Sub Bagian Umum Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.



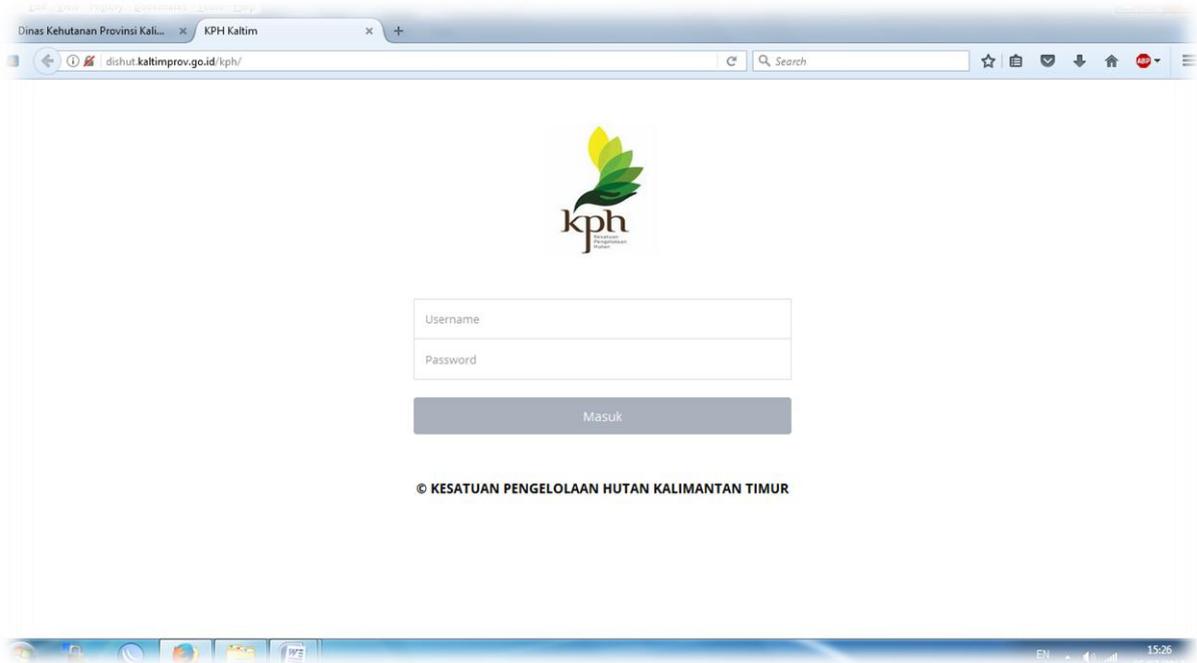
Sistem Informasi Kehutanan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim berbasis website.



Sistem Informasi Barang Milik Daerah Dinas Kehutanan Prov. Kaltim berbasis website.



Sistem Informasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Daerah Dinas Kehutanan Prov. Kaltim berbasis website.



LAMPIRAN 2
BERITA KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR